

PERAN TEOLOGI ISLAM DALAM ETIKA SOSIAL POLITIK MASYARAKAT KOTA PAREPARE

(The Role of Islamic Theology in Social Political Ethics Community)

Hj. Marhani Badaruddin

marhanibaharuddin@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

Abstract, Islam places theological aspects as the foundation of Islamic teachings. The theological aspect determines the actualization of individual and social piety. Islamic theology plays a central role in actualizing the piety of the rituals of the so-called worship as well as the horizontal-social piety commonly called muamalah. This study discusses the role of Islamic theology in Parepare City, an overview of the social ethics of the politics of the people of Parepare City and the role of Islamic theology in the social ethics of the Parepare people. The purpose of this research is to get empirical data about the description of Islamic theology, socio-political ethics and the role of Islamic theology in socio-political ethics of the people of Parepare City. Moral development and political ethics must be born from leaders. People or people who have the wisdom of tradition and religious morals must continue to be strengthened again through exemplary leaders. From here the title of religious nation inherent in the nation will find its strength, both at the social level of society and in the level of political practice in the state. Social phenomena of a plural society require socio-political ethics. Of course religious understanding as a surviving factor to make socio-political ethics as the legal basis in various aspects of community life.

Keywords: Islamic theology, ethics and social politics.

Islam menempatkan aspek teologi sebagai fondasi ajaran Islam. Aspek teologi menentukan aktualisasi kesalahan individual dan sosial. Teologi Islam berperan sentral dalam mengaktualisasikan kesalahan vertikal-ritual yang biasa disebut ibadah sekaligus kesalahan horizontal-sosial yang biasa disebut muamalah. Penelitian ini membahas gambaran peran teologi Islam di Kota Parepare, gambaran etika sosial politik masyarakat Kota Parepare dan peran teologi Islam dalam etika sosial politik masyarakat Kota Parepare. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data empiris mengenai gambaran teologi Islam, etika sosial politik dan peran teologi Islam dalam etika sosial politik masyarakat Kota Parepare. Pembangunan moral dan etika politik harus lahir dari para pemimpin. Umat atau rakyat yang memiliki kearifan-kearifan tradisi dan moral agama harus terus dikuatkan lagi melalui keteladanan para pemimpinnya. Dari sinilah sebutan bangsa religius yang melekat pada bangsa akan menemukan kekuatannya, baik di tingkat sosial masyarakat maupun di tingkat praktik politik bernegara. Gejala sosial masyarakat yang majemuk membutuhkan etika sosial politik. Tentu paham keagamaan sebagai faktor yang survive untuk menjadikan etika sosial politik sebagai dasar hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Teologi Islam, etika dan sosial politik.

PENDAHULUAN

Pasca orde baru, sistem politik di tanah air telah banyak berubah. Tetapi perubahan itu masih pada tataran prosedural (aturan-aturan politik) dan belum menyentuh kebaikan-kebaikan di tingkat masyarakat pada umumnya. Masyarakat dan Bangsa Indonesia dewasa ini sedang menapak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang bebas dan mampu mengatasi krisis moral.

Dalam konteks umat Islam (teologi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama) sebagai mayoritas, praktik politik belum menyuguhkan kebajikan-kebajikan moral bagi umat. Praktik politik masih terus dinodai oleh praktik-praktik korupsi yang akut, sehingga umat Islam tidak memperoleh pelajaran moral dalam masalah politik. Karena itu, umat Islam terus bersama kekuatan bangsa yang lain termasuk pemerintah mendukung

program pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Keunggulan etika politik para pemimpin akan membentengi moral masyarakat sehingga rakyat menaruh kepercayaan tinggi pada para pemimpinnya.

Pembangunan moral dan etika politik harus lahir dari para pemimpin. Umat atau rakyat yang memiliki kearifan-kearifan tradisi dan moral agama harus terus dikuatkan lagi melalui keteladanan para pemimpinnya. Dari sinilah sebutan bangsa religius yang melekat pada bangsa akan menemukan kekuatannya, baik di tingkat sosial masyarakat maupun di tingkat praktik politik bernegara. Gejala sosial masyarakat yang majemuk membutuhkan etika sosial politik. Tentu paham keagamaan sebagai faktor yang survive untuk menjadikan etika sosial politik sebagai dasar hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Konsep teologi Islam dalam etika sosial politik yang akan menyikapi setiap tahap perkembangan dan perubahan dalam setiap perilaku masyarakat khususnya di Kota Parepare. Menghadapi kedua isu ini, pemikiran pahan keagamaan yang eksklusif, ternyata tidak menyebabkan bersikap intoleran dan permusuhan terhadap penganut agama lain. Paham eksklusif keagamaan ini, ternyata masih sangat erat dengan konsep pluralisme agama-agama dalam etika sosial politik. Paham keagamaan tentunya bersama-sama menghargai kebenaran agama-agama lain, namun melarang pernikahan dengan non-Muslim, tetapi tetap membebaskan hubungan muamalat.

Paham keagamaan dalam berbagai organisasi keagamaan di Kota Parepare ini sesungguhnya bersikap terbuka terhadap perubahan dan perkembangan jaman, tetapi berbeda bentuk dalam pemikiran dan cara menyikapi. Sikap keterbukaan inilah yang mempermudah generasi muda pada masing-masing teologi Islam dalam menyesuaikan perkembangan jaman. Sikap keterbukaan ini pula yang menyebabkan organisasi

keagamaan semakin besar dan eksis. Semua perbedaan paham keagamaan ini tetap dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah saw., sebagaimana terdapat dalam *al-Qur'an* surat an-Nisa` ayat 59 sebagai berikut:

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemah:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (*al-Quran*) dan Rasul (*sunnahnya*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya.

PEMBAHASAN

1. Teologi Islam

Dalam Islam dikenal adanya paham-paham atau aliran-aliran sebagai teologi dalam Islam, antara lain: Syi'ah, Khawarij, Murjiah, Qadariyah, Jabariyah Mu'tazilah, Asy'ariyah Maturidiyah, Ahlus Sunnah, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Firqoh bisa diartikan *sekte*. Dalam pembahasan ini selanjutnya dipergunakan istilah teologi Islam.

2. Etika Sosial Politik

Etika Politik terdiri dari dua kata yaitu Etika dan Politik. Etika (Yunani Kuno: "*ethikos*", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sebuah, sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Sedangkan Politik adalah proses pembagian kekuasaan yang melibatkan interaksi

antara pemerintah dan/atau masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Jadi etika politik adalah nilai-nilai azas moral yang disepakati bersama baik pemerintah dan/atau masyarakat untuk dijalankan dalam proses pembagian kekuasaan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk kebaikan bersama.

Pembicaraan tentang etika adalah pembicaraan tentang moral. Etika adalah variabel penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk politik (*zoon politicon*: binatang politik) memerlukan sendi-sendi untuk menjadi perekat perilaku-perilaku sosial yang berakhlak dan beretika di dalam sebuah masyarakat. Karena itu, dalam politik keberadaan etika sangat penting.

Politik adalah seni mengatur masyarakat, politik bukanlah wujud kotor yang harus dijauhi. Ungkapan "politik itu kotor" hanya benar bila di dalam politik itu tidak ada etika atau akhlak. Sebagai bangsa religius harus mengisikan muatan-muatan etis dan moral ke dalam politik. Tanpa misi ini, politik akan terus menjadi wilayah abu-abu yang banyak menghadirkan kemudaratan ketimbang kemaslahatan.

Umat Islam tidak perlu pesimis terhadap masalah politik, karena sikap pesimis justru akan menjauhkan jarak politik dengan pemerintah. Mengedepankan sikap optimis justru lebih baik karena ia menjadi media dialog dan komunikasi politik yang baik. Inilah salah satu akhlak politik yang diajarkan oleh Islam.

Islam merupakan agama moral. Ibnul Qayyim bahkan mengatakan bahwa semua isi agama adalah etika. "Barang siapa bertambah etikanya, maka bertambah pula agamanya". Ungkapan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap masalah moral dan etika yang tujuannya adalah untuk menegakkan kehidupan yang lebih adil, harmonis, dan kemauan untuk bekerja

sama. Selain itu, sebuah Hadis Nabi menyatakan, *sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti*.

Logika hadis ini hendak mengemukakan bahwa masyarakat tidak akan sempurna tanpa moral atau budi pekerti (akhlak). Nabi tidak perlu diutus jika tidak ada misi penyempurnaan moral. Kumpulan orang-orang di dalam suatu kelompok masyarakat harus diikat oleh suatu konsensus-konsensus sosial yang bermoral sehingga kepentingan setiap orang tidak saling bertabrakan. Itulah sebabnya, kepemimpinan dibutuhkan untuk mengorganisasikan sendiri berbagai kepentingan itu dalam wadah sistem politik. Pemerintahan Nabi Muhammad saw., di Madinah adalah pemerintahan yang berjalan berdasarkan moral al-Qur'an. Hukum ditegakkan dan ketidakadilan tak boleh hidup di dalam masyarakat Islam.

Selama pemerintahannya, nabi disamping berpegang pada wahyu juga mengajak bermusyawarah dengan para sahabat. Karena itu, tidak ada gerakan perlawanan yang menggerogoti pemerintahannya. Hal ini terjadi karena dua hal, yaitu *pertama*, pemerintahan Nabi Muhammad saw., berlandaskan etika. *Kedua*, tindakan makar tidak diperkenankan karena ia sama dengan melanggar kepatuhan kepada ulil amr dan Rasulullah.

Laporan-laporan tertulis menyebutkan bahwa ketika di Mekah, Nabi biasa dihina dan dicacimaki. Tidak ada tindakan kepada para penghina, malah dimaafkan. Hal ini terjadi karena di Mekah Islam belum menjadi sebuah masyarakat. Tetapi ketika di Madinah, orang yang menghina Nabi Muhammad saw., dihukum bunuh. Imam al-Syaukani dalam Nailul Athār Jilid VII, h. 213-115 mengemukakan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib: *Bahwa ada seorang wanita Yahudi yang sering mencela dan menjelek-jelekkan Nabi saw., lalu perempuan itu dicekik sampai mati oleh seorang laki-laki. Ternyata Rasulullah saw., menghalalkan darahnya*.

Riwayat ini dikemukakan untuk menunjukkan bahwa dalam politik itu ada etika sehingga cara mengkritik yang merongrong kewibawaan suatu pemerintahan adalah sebuah pembangkangan yang bisa mendorong pada tindakan makar. Kritik haruslah disampaikan secara konstruktif dan dengan alasan-alasan yang rasional serta mengedepankan etika moral sehingga ia berguna bagi perubahan-perubahan kebijakan pemerintahan. Selanjutnya, dalam pemerintahan para Khulafa Rasyidin juga telah menampilkan sebuah etika pemerintahan. Supremasi hukum ditegakkan dan kepentingan rakyat dikedepankan.

Masa pemerintahan Khulafa Rasyidin dinilai banyak sejarahwan paling etis, bermoral, dan demokratis meski ada sejumlah kelemahan-kelemahan. Namun kelemahan-kelemahan itu ditutup oleh kecemerlangan etis yang menghadirkan keadilan dan rasa aman. Pelajaran praktik politik dalam sejarah Islam di atas harus menjiwai moral masyarakat Indonesia.

Urgensi etika politik dalam menuntut keadilan, membangun demokrasi dan legitimasi tindakan harus merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai hukum atau peraturan perundangan. Di sini letak celah di mana etika politik bisa berbicara dengan otoritas. Politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi *indignation* (terusik dan protes terhadap ketidakadilan). Keberpihakan pada korban tidak akan mentolerir politik yang kasar. Jeritan korban adalah berita duka bagi etika politik.

Pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan membangkitkan kesadaran akan perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil. Penyelesaian semacam ini tidak akan terwujud bila tidak mengacu ke etika politik. Seringnya pernyataan "perubahan harus konstitusional", menunjukkan etika politik tidak bisa

diabaikan begitu saja. Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil.

Dalam definisi Ricoeur, etika politik tidak hanya menyangkut perilaku individual saja, tetapi terkait dengan tindakan kolektif (etika sosial). Dalam etika individual, kalau orang mempunyai pandangan tertentu bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Sedangkan dalam etika politik, yang merupakan etika sosial, untuk dapat mewujudkan pandangannya dibutuhkan persetujuan dari sebanyak mungkin warga negara karena menyangkut tindakan kolektif. Maka hubungan antara pandangan hidup seseorang dengan tindakan kolektif tidak langsung, membutuhkan perantara. Perantara ini berfungsi menjembatani pandangan pribadi dengan tindakan kolektif. Perantara itu bisa berupa simbol-simbol maupun nilai-nilai: simbol-simbol agama, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan sebagainya.

Melalui simbol-simbol dan nilai-nilai itu, politikus berusaha meyakinkan sebanyak mungkin warga negara agar menerima pandangannya sehingga mendorong kepada tindakan bersama. Maka politik disebut seni karena membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan melalui wicara dan persuasi, bukan manipulasi, kebohongan, dan kekerasan. Etika politik akan kritis terhadap manipulasi atau penyalahgunaan nilai-nilai dan simbol-simbol itu. Ia berkaitan dengan masalah struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mengkondisikan tindakan kolektif.

Tuntutan pertama etika politik adalah "hidup baik bersama dan untuk orang lain". Pada tingkat ini, etika politik dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warga negara. Politikus yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang

lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan golongannya. Jadi, politikus yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral.

Dalam sejarah filsafat politik, filsuf seperti Socrates sering dipakai sebagai model yang memiliki kejujuran dan integritas. Politik dimengerti sebagai seni yang mengandung kesantunan. Kesantunan politik diukur dari keutamaan moral. Kesantunan itu tampak bila ada pengakuan timbal balik dan hubungan fair di antara para pelaku politik.

Pemahaman etika politik semacam ini belum mencukupi karena sudah puas bila diidentikkan dengan kualitas moral politikus. Belum mencukupi karena tidak berbeda dengan pernyataan. "Bila setiap politikus jujur, maka Indonesia akan makmur". Dari sudut koherensi, pernyataan ini sah, tidak terbantahkan. Tetapi dari teori korespondensi, pernyataan hipotesis itu terlalu jauh dari kenyataan.

Etika politik, yang hanya puas dengan koherensi norma-normanya dan tidak memperhitungkan real politik, cenderung mandul. Namun bukankah real politik, seperti dikatakan Machiavelli, adalah hubungan kekuasaan atau pertarungan kekuatan? Masyarakat bukan terdiri dari individu-individu subyek hukum, tetapi terdiri dari kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang saling berlawanan. Politik yang baik adalah politik yang bisa mencapai tujuannya, apapun caranya.

Situasi Indonesia saat ini tidak jauh dari gambaran politik dan moral menjadi dua dunia yang berbeda. Etika politik seakan menjadi tidak relevan. Relevansi etika politik terletak pada kemampuannya untuk menjinakkan kekuatan itu dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi yang lebih adil. Institusi sosial dan keadilan

prosedural harus adil karena mempengaruhi struktur dasar masyarakat.

Dalam struktur dasar masyarakat, seperti dikatakan John Rawls, sudah terkandung berbagai posisi sosial dan harapan masa depan anggota masyarakat berbeda-beda dan sebagian ditentukan oleh sistem politik dan kondisi sosial-ekonomi. Terlebih lagi, institusi-institusi sosial tertentu mendefinisikan hak-hak dan kewajiban masyarakat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi masa depan setiap orang, cita-citanya, dan kemungkinan terwujudnya.

Dengan demikian institusi-institusi sosial itu sudah merupakan sumber kepincangan karena sudah merupakan titik awal keberuntungan bagi yang satu dan kemalangan bagi yang lain. Maka membangun institusi-institusi yang adil adalah upaya memastikan terjaminnya kesempatan sama sehingga kehidupan seseorang tidak pertama-tama ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh pilihannya.

Keutamaan moral politikus tidak cukup tanpa adanya komitmen untuk merombak institusi-institusi sosial yang tidak adil, penyebab laten kekerasan yang sering terjadi di Indonesia. Maka sering didengar pepatah yang jujur hancur. Ungkapan ini menunjukkan urgensi membangun institusi-institusi yang adil. Ini bisa dimulai dengan menerapkan keadilan prosedural.

Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukum-hukum, undang-undang. Jadi prosedur ini terkait dengan legitimasi dan justifikasi. Misalnya, kue tart harus dibagi adil untuk lima orang. Maka peraturan yang menetapkan "yang membagi harus mengambil pada giliran yang terakhir" dianggap sebagai prosedur yang adil. Dengan ketentuan itu, bila pembagi ingin mendapat bagian yang tidak lebih kecil dari yang lain, dengan sendirinya, tanpa harus dikontrol, dia akan berusaha

membagi kue itu sedemikian rupa sehingga sama besarnya.

Di Indonesia, para penguasa, yang dalam arti tertentu adalah pembagi kekayaan atau hasil kerja sosial, justru sebaliknya, berebut untuk mengambil yang pertama. Tentu saja akan mengambil bagian yang terbesar. Maka banyak orang atau kelompok yang mempertaruhkan semua untuk berebut kekuasaan. Keadilan prosedural menjadi tulang punggung etika politik karena sebagai prosedur sekaligus mampu mengontrol dan menghindarkan semaksimal mungkin penyalahgunaan. Keadilan tidak diserahkan kepada keutamaan politikus, tetapi dipercayakan kepada prosedur yang memungkinkan pembentukan sistem hukum yang baik sehingga keadilan distributif, komutatif, dan keadilan sosial bisa dijamin.

Dengan demikian, sistem hukum yang baik juga menghindarkan pembusukan politikus. Memang, bisa terjadi meski hukum sudah adil, seorang koruptor divonis bebas karena beberapa alasan kepiawaian pengacara, tak cukup bukti, tekanan terhadap hakim, dan sebagainya. Padahal, prosedur hukum positif yang berlaku tidak mampu memuaskan rasa keadilan, penyelesaiannya harus mengacu ke prinsip *epieikeia* (yang benar dan yang adil). Bagaimana menentukan kriteria kebenaran dan keadilan?

Semua diperlakukan sama di depan hukum. Ketidaksamaan perlakuan hanya bisa dibenarkan bila memihak kepada yang paling tidak diuntungkan atau korban. Secara struktural, korban biasanya sudah dalam posisi lemah, misalnya, warga terhadap penguasa, minoritas terhadap mayoritas. Prinsip *epieikeia* ini mengandaikan integritas hakim, penguasa atau yang berkompoten menafsirkan hukum. Maka ada tuntutan timbal balik, prosedur yang adil belum mencukupi bila tidak dilaksanakan oleh pribadi yang mempunyai keutamaan moral.

Perlu dibedakan antara etika politik dengan moralitas politisi. Moralitas politisi menyangkut mutu moral negarawan dan politisi secara pribadi (dan memang sangat diandaikan), misalnya apakah ia korup atau tidak (di sini tidak dibahas). Etika politik menjawab dua pertanyaan.

Etika politik adalah perkembangan filsafat di zaman pasca tradisional. Dalam tulisan para filosof politik klasik: Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Marsilius dari Padua, Ibnu Khaldun, kita menemukan pelbagai unsur etika politik, tetapi tidak secara sistematis. Dua pertanyaan etika politik di atas baru bisa muncul di ambang zaman modern, dalam rangka pemikiran zaman pencerahan, karena pencerahan tidak lagi menerima tradisi/otoritas/agama, melainkan menentukan sendiri bentuk kenegaraan menurut *ratio/nalar*, secara etis. Maka sejak abad ke-17 filsafat mengembangkan pokok-pokok etika politik seperti: Perpisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan Negara (John Locke), Kebebasan berpikir dan beragama (Locke), Pembagian kekuasaan (Locke, Montesquie), Kedaulatan rakyat (Rousseau), Negara hukum demokratis/republican (Kant), Hak-hak asasi manusia (Locke, dsb) dan Keadilan sosial.

3. Prinsip-prinsip dasar etika politik kontemporer dapat dibagi atas:

a. Pluralisme

Dengan pluralism dimaksud kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya, untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, adat. Pluralism mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang. Lawan pluralism adalah intoleransi, segenap paksaan dalam hal agama, kepicikan

ideologis yang mau memaksakan pandangannya kepada orang lain. Prinsip pluralism terungkap dalam Ketuhanan Yang Maha Esa yang menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada orang yang boleh didisriminasikan karena keyakinan religiusnya. Sikap ini adalah bukti keberadaban dan kematangan karakter kolektif bangsa.

b. Hak Azasi Manusia

Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak asasi manusia adalah baik dan mutlak. Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian Negara, masyarakat, melainkan karena ia manusia, jadi dari tangan Sang Pencipta. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menolak kekerasan dan eksklusivisme suku dan ras. Pelanggaran hak-hak asasi manusia tidak boleh dibiarkan.

Paham solidaritas mengatakan bahwa kita tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain. Sosialitas manusia berkembang secara melingkar: keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. Maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. Solidaritas itu dilanggar dengan kasar oleh korupsi. Korupsi bagaikan kanker yang mengerogoti kejujuran, tanggung-jawab, sikap objektif, dan kompetensi orang/kelompok orang yang korup.

Prinsip "kedaulatan rakyat" menyatakan bahwa tak ada manusia, atau

sebuah elit, atau sekelompok ideology, atau sekelompok pendeta/pastor/ulama berhak untuk menentukan dan memaksakan (menuntut dengan pakai ancaman) bagaimana orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Demokrasi adalah "kedaulatan rakyat plus prinsip keterwakilan". Jadi demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik.

Demokrasi hanya dapat berjalan baik atas dua dasar: Pengakuan dan jaminan terhadap HAM; perlindungan terhadap HAM menjadi prinsip mayoritas tidak menjadi kediktatoran mayoritas. Hal kedua adalah kekuasaan dijalankan atas dasar, dan dalam ketaatan terhadap hukum (Negara hukum demokratis). Maka kepastian hukum merupakan unsur hakiki dalam demokrasi (karena mencegah pemerintah yang sewenang-wenang).

c. Keadilan sosial

Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Maksud baik apapun kandas apabila melanggar keadilan. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Keadilan social mencegah bahwa masyarakat pecah ke dalam dua bagian; bagian atas yang maju terus dan bagian bawah yang bisa survive di hari berikut.

Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis, sebagai pelaksanaan ide-ide, ideology-ideologi, agama-agama tertentu; keadilan social tidak sama dengan sosialisme. Keadilan social adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan social diusahakan dengan membongkar ketidakadilan-ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Di mana perlu diperhatikan bahwa ketidakadilan itu bersifat struktural, bukan pertama dari individual. Artinya, ketidakadilan tidak

pertama-tama terletak dalam sikap kurang adil orang-orang tertentu (misalnya para pemimpin), melainkan dalam struktur-struktur politik/ekonomi /sosial/budaya/ideologis.

Struktur-struktur itu hanya dapat dibongkar dengan tekanan dari bawah dan tidak hanya dengan kehendak baik dari atas. Ketidakadilan struktural paling gawat sekarang adalah sebagian besar masalah kemiskinan. Ketidakadilan struktur lain adalah diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar ras, suku dan budaya.

d. **Etika politik, bukan hanya moralitas politikus**

Banyak pengamat politik berpandangan sinis: "Berbicara etika politik itu seperti berteriak di padang gurun." "Etika politik itu nonsens". Realitas politik adalah pertarungan kekuatan dan kepentingan. Politik dibangun bukan dari yang ideal, tidak tunduk kepada apa yang seharusnya. Dalam politik, kecenderungan umum adalah tujuan menghalalkan segala cara.

Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Definisi etika politik membantu menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi menjadi hanya sekadar etika individual perilaku individu dalam bernegara.

Pengertian etika politik dalam perspektif Ricoeur mengandung tiga tuntutan, pertama, upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain, kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan, ketiga, membangun institusi-institusi yang adil. Tiga tuntutan itu saling terkait. "Hidup baik bersama dan untuk orang lain" tidak mungkin terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Hidup baik

tidak lain adalah cita-cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan dengan menghindarkan warganegara atau kelompok-kelompok dari saling merugikan. Sebaliknya, kebebasan warganegara mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil. Pengertian kebebasan yang terakhir ini yang dimaksud adalah syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi pelaksanaan kongkret kebebasan atau disebut *democratic liberties*: kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya.

Tuntutan pertama etika politik adalah "hidup baik bersama dan untuk orang lain". Pada tingkat ini, etika politik dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warganegara. Politikus yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan golongannya. Jadi, politikus yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral.

e. **Institusi sosial dan keadilan prosedural**

Institusi-institusi sosial harus adil karena mempengaruhi struktur dasar masyarakat. Dalam struktur dasar masyarakat, seperti dikatakan John Rawls, sudah terkandung berbagai posisi sosial dan harapan masa depan anggota masyarakat berbeda-beda dan sebagian ditentukan oleh sistem politik dan kondisi sosial-ekonomi. Terlebih lagi, institusi-institusi sosial tertentu mendefinisikan hak-hak dan kewajiban masyarakat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi masa depan setiap orang, cita-citanya, dan kemungkinan terwujudnya. Dengan demikian institusi-institusi sosial itu sudah merupakan sumber kepincangan karena sudah merupakan titik awal keberuntungan bagi

yang satu dan kemalangan bagi yang lain. Maka membangun institusi-institusi yang adil adalah upaya memastikan terjaminnya kesempatan sama sehingga kehidupan seseorang tidak pertama-tama ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh pilihannya.

Keutamaan moral politikus tidak cukup tanpa adanya komitmen untuk merombak institusi-institusi sosial yang tidak adil, penyebab laten. kekerasan yang sering terjadi di Indonesia. Maka sering didengar pepatah "yang jujur hancur". Ungkapan ini menunjukkan. Urgensi membangun institusi-institusi yang adil. Ini bisa dimulai dengan menerapkan keadilan prosedural.

Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukum-hukum, undang-undang. Jadi prosedur ini terkait dengan legitimasi dan justifikasi. Misalnya, kue tart harus dibagi adil untuk lima orang. Maka peraturan yang menetapkan "yang membagi harus mengambil pada giliran yang terakhir" dianggap sebagai prosedur yang adil. Dengan ketentuan itu, bila pembagi ingin mendapat bagian yang tidak lebih kecil dari yang lain, dengan sendirinya, tanpa harus dikontrol, dia akan berusaha membagi kue itu sedemikian rupa sehingga sama besarnya.

Menentukan kriteria kebenaran dan keadilan semua diperlakukan sama di depan hukum. Ketidaksamaan perlakuan hanya bisa dibenarkan bila memihak kepada yang paling tidak diuntungkan atau korban. Secara struktural, korban biasanya sudah dalam posisi lemah, misalnya, warga terhadap penguasa, minoritas terhadap mayoritas. Prinsip *epieikeia* ini mengandaikan integritas hakim, penguasa atau yang berkompoten menafsirkan hukum. Maka ada tuntutan timbal balik, prosedur yang adil belum mencukupi bila tidak dilaksanakan oleh pribadi yang mempunyai keutamaan moral.

Hasil Penelitian

a. Letak Geografis Kota Parepare

Secara geografis, Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah utara-selatan maupun arah timur-barat. Sesuai dengan arahan pengembangan wilayah, maka Kota Parepare ditetapkan sebagai pusat pelayanan antar wilayah.

Kota Parepare terletak antara 3° 57' 39" - 4° 04' 49" Lintang Selatan dan 119° 43' 40" Bujur Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pinrang di sebelah utara, Kabupaten Sidenreng Rappang di sebelah timur, Kabupaten Barru di sebelah selatan, dan selat Makassar di sebelah barat.¹

Luas wilayah Kota Parepare tercatat 99,33 km² meliputi empat kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Ujung, dan Kecamatan Soreang. Secara administrasi pemerintahan, Kota Parepare terbagi menjadi empat kecamatan dan 22 kelurahan.

Mengantisipasi perkembangan yang terjadi saat ini, maka luas wilayah Kota Parepare akan mengalami perubahan semakin bertambah dengan adanya berbagai kegiatan pembangunan seperti pelaksanaan reklamasi pantai yang menambah luas wilayah daratan serta perencanaan ke depan untuk melakukan penetapan batas wilayah laut, sehingga luas keseluruhan terdiri atas luas wilayah daratan dan lautan.

Gambaran kondisi topografi Kota Parepare, secara umum terbagi dalam dua morfologi, yaitu daratan dan perbukitan. Bentuk lahan daratan terletak di wilayah pesisir pantai, dan secara umum merupakan daerah yang cukup padat penduduk, pusat aktivitas kota dengan besaran luasan 30 persen dari luas wilayah. Sedangkan bentuk lahan perbukitan merupakan wilayah yang dominan di Kota Parepare, memanjang dari arah utara selatan dan timur barat. Wilayah ini merupakan wilayah pengembangan yang sifatnya terbatas, karena ada sebagian kondisi topografi yang mempunyai tingkat ketererangan yang curam. Luasan daerah

¹Parepare dalam Angka

perbukitan ini sekitar 70 persen dari luas wilayah Kota Parepare.

b. Keadaan Demografis

Tahun 2012 penduduk Kota Parepare adalah sebanyak 129.262 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 63.481 jiwa dan perempuan berjumlah 65.781 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.301 jiwa/km. hingga tahun 2012 sex ratio antara jumlah laki-laki dan perempuan sebesar 97 laki-laki diantara 100 perempuan. Akibat pergeseran rasio ini yaitu laki-laki lebih banyak menurun disebabkan karena penduduk laki-laki lebih banyak keluar daerah untuk mencari pekerjaan dan bekerja serta sekolah. sementara laju pertumbuhan penduduk selama periode 2007-2012 sebesar 4,40 persen.

Selanjutnya tingkat kepadatan penduduk yang tersebar berada di Kecamatan Soreang dengan angka sebesar 5.218 jiwa/km, Kecamatan Ujung sebesar 2.852 jiwa/km, Kecamatan Bacukiki Barat sebesar 3007 jiwa/km, dan Kecamatan Bacukiki sebesar 217 jiwa/km. tingkat kepadatan penduduk tersebut dapat dilihat dalam tabel satu sebagai berikut:

Sedangkan kelurahan yang paling padat penduduknya berada di Kelurahan Kampung Pisang, Ujung Lare, Lakessi, Labukkang, Sumpang Minangae, Ujung Bulu, Ujung Baru, Tiro Sompe, Mallusetasi, dan Ujung Sabbang. Secara umum, kelurahan-kelurahan yang padat penduduk berada di wilayah pesisir Parepare dengan luas wilayah 0,22 km² – 0,48 km² dengan jumlah penduduk yang cukup besar.

Data komposisi penduduk menurut kelompok umur yakni antara 4.013 – 10.335 jiwa dan jumlah rumah tangga antara 1.035 – 1.469 KK. menunjukkan bahwa 58,47 persen usia muda (1-29 tahun) dan kelompok usia tua (30-65+ tahun) sebanyak 41,53 persen.

Keadaan penduduk Kota Parepare menunjukkan bahwa dari 129.262 ribu terdapat 63.481 orang laki-laki atau 49,11% sedangkan penduduk perempuan sebanyak 65.781 orang atau 50,89%. Artinya jumlah penduduk perempuan lebih tinggi ketimbang penduduk laki-laki dengan selisih 1,78%. Kelompok umur yang terbanyak adalah

umur antara 5-9 tahun sedangkan kelompok umur yang paling sedikit adalah umur antara 60-64 tahun.

c. Keadaan Sosial Spiritual

Pada bidang sosial spiritual; pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan. Pada tahun 2010, Kementerian Agama Kota Parepare mencatat 118 bangunan masjid, 17 bangunan gereja, 4 bangunan vihara, dan 1 bangunan sanggar.

Selain itu, data lembaga sosial keagamaan Kota Parepare yang terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dapat digambarkan dalam tabel tiga yang terdiri atas:

Gambaran keadaan lembaga sosial keagamaan Kota Parepare terdiri atas 9 nama lembaga, dan lembaga yang tertua adalah Nahdlatul Ulama yaitu berdiri pada tahun 1941 yang disusul oleh lembaga sosial keagamaan Muhammadiyah yang berdiri tahun 1953. Lembaga sosial keagamaan yang tergolong masih sangat mudah yaitu KPPSI yang didirikan oleh Abdul Asiz Kahar Muzakkar.

d. Teologi Islam Masyarakat Kota Parepare

Berdasarkan variabel penelitian dan merujuk pada rumusan masalah penelitian, maka penyajian data dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian besar, yaitu Peranan Teologi Islam dan Etika Sosial Politik Masyarakat Kota Parepare.

Dalam konteks umat Islam (teologi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama) sebagai mayoritas, praktik politik belum menyuguhkan kebajikan-kebajikan moral bagi umat. Praktik politik masih terus dinodai oleh praktik-praktik korupsi yang akut, sehingga umat Islam tidak memperoleh pelajaran moral dalam masalah politik. Karena itu, umat Islam terus bersama kekuatan bangsa yang lain termasuk pemerintah mendukung program pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Keunggulan etika politik para pemimpin akan membentengi moral masyarakat sehingga rakyat menaruh kepercayaan tinggi pada para pemimpinnya.

Pembangunan moral dan etika politik harus lahir dari para pemimpin. Umat atau rakyat yang memiliki kearifan-kearifan tradisi dan moral agama harus terus dikuatkan lagi melalui keteladanan para pemimpinnya. Dari sinilah sebutan bangsa religius yang melekat pada bangsa akan menemukan kekuatannya baik di tingkat sosial masyarakat maupun di tingkat praktik politik bernegara. Gejala sosial masyarakat yang majemuk membutuhkan etika sosial politik. Tentu paham keagamaan sebagai faktor yang survive untuk menjadikan etika sosial politik sebagai dasar hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Teologi Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah teologi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam membangun etika sosial politik masyarakat khususnya di Kota Parepare.

Pengaruh teologi Islam masyarakat Kota Parepare dapat dihitung melalui distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi bergolong sebagai berikut:

Tabel 4

Teologi Islam Masyarakat Kota Parepare

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
39.00	2	3.3	3.3	3.3
42.00	3	5.0	5.0	8.3
44.00	3	5.0	5.0	13.3
45.00	4	6.7	6.7	20.0
47.00	5	8.3	8.3	28.3
48.00	4	6.7	6.7	35.0
49.00	4	6.7	6.7	41.7
50.00	4	6.7	6.7	48.3
51.00	3	5.0	5.0	53.3
52.00	9	15.0	15.0	68.3
53.00	2	3.3	3.3	71.7
54.00	8	13.3	13.3	85.0
55.00	2	3.3	3.3	88.3
56.00	2	3.3	3.3	91.7
57.00	3	5.0	5.0	96.7
58.00	2	3.3	3.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Gambaran tentang teologi Islam masyarakat Kota Parepare dapat diungkapkan melalui pengukuran instrumen penelitian. Instrumen penelitian tersebut disebarkan pada 60 sampel masyarakat muslim Muhammadiyah dan NU.

Untuk menentukan pemetaan skala pengukuran nilai perhitungan distribusi frekuensi yang diperoleh, ditetapkan berdasarkan skala interval Guilford dengan rumus:

$$i = \frac{r}{k}$$

dimana:

i = Lebar Interval

r = Jarak pengukuran (jumlah tertinggi dikurangi dengan jumlah terendah plus 1)

k = jumlah interval

Berdasarkan rumus Guilford tersebut diperoleh:

$$i = \frac{(60-12)+1}{5}$$

i = 10 (dibulatkan)

Data hasil penelitian tentang peranan teologi Islam masyarakat Kota Parepare dapat dilihat pada instrumen penelitian (terlampir). Proses perhitungan berdasarkan data tersebut dapat didasarkan pada tabel penolong di bawah ini:

Tabel 5

Distribusi Frekuensi Bergolong tentang Teologi Islam Masyarakat Kota Parepare

Interval Nilai	Titik Tengah (X)	Frekuensi (f)	fX	Kategori
51 – 60	55,5	31	1720,5	Sangat Tinggi
41 – 50	45,5	27	1228,5	Kuat/Tinggi
31 – 40	35,5	2	71	Sedang/Cukup
21 – 30	25,5	0	0	Rendah
	15,5	0	0	Sangat Rendah

11 – 20				
Jumlah	-	N= 60	$\sum f_x = 3020$	

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2015

Tabel tersebut di atas memberikan data hasil perhitungan bahwa jumlah frekuensi fX diperoleh sebesar 3020, sedangkan jumlah sampel 60 orang masyarakat muslim, maka nilai rata-rata (mean) dapat diperoleh dengan rumus:

$$M = \frac{fX}{N} = \frac{3020}{60} = 50 \text{ (dibulatkan)}$$

Hasil perhitungan dengan statistik deskriptif tersebut diperoleh mean sebesar 50 yang ditetapkan dalam skala pengukuran tergolong kategori tinggi/baik sebagaimana penjelasan dalam tabel penolong di atas bahwa nilai mean 50,3 berada pada garis interval nilai antara 41 – 50. Dengan demikian, gambaran teologi Islam masyarakat Kota Parepare adalah tinggi/baik yang hampir masuk dalam kategori sangat tinggi atau sangat baik.

Hasil perhitungan SPSS for windows versi 20,00 diperoleh angka pembulatan sebanyak 50, sehingga hasil analisis manual dan analisis SPSS hasilnya sama. Dengan demikian analisis data hasil penelitian adalah valid dan reliable.

e. Etika Sosial Politik Masyarakat Kota Parepare

Pembangunan moral dan etika sosial politik harus lahir dari para pemimpin. Umat atau rakyat yang memiliki kearifan-kearifan tradisi dan moral agama terus dikuatkan lagi melalui keteladanan para pemimpinnya. Dari sinilah sebutan bangsa religius yang melekat pada bangsa akan menemukan kekuatannya baik di tingkat sosial masyarakat maupun di tingkat praktik politik bernegara. Gejala etika sosial politik masyarakat yang majemuk membutuhkan etika sosial politik. Tentu paham keagamaan sebagai faktor yang survive untuk menjadikan etika sosial

politik sebagai dasar hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Uraian perhitungan data hasil penelitian melalui instrumen-instrumen penelitian pada skala likert gradasi lima dan dua belas item pernyataan dapat disajikan dalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian tersebut diperoleh dari sampel masyarakat yang tersebar pada empat kecamatan dalam wilayah Kota Parepare.

Data hasil penelitian etika sosial politik masyarakat Kota Parepare dapat dilihat pada instrumen penelitian (terlampir). Proses perhitungan berdasarkan data tersebut dapat didasarkan pada tabel penolong di bawah ini:

Distribusi Frekuensi Bergolong tentang Etika Sosial Politik Masyarakat Kota Parepare

Interval Nilai	Titik Tengah (X)	Frekuensi (f)	fX	Kategori
51 – 60	55,5	54	2997	Sangat Tinggi
41 – 50	45,5	6	273	Kuat/Tinggi
31 – 40	35,5	0	0	Sedang/Cukup
21 – 30	25,5	0	0	Rendah
11 – 20	15,5	0	0	Sangat Rendah
Jumlah	-	N= 60	$\sum f_x = 3270$	

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2015

Tabel tersebut di atas memberikan data hasil perhitungan bahwa jumlah frekuensi fX diperoleh sebesar 3270, sedangkan jumlah sampel 60 orang masyarakat muslim, maka nilai rata-rata (mean) dapat diperoleh dengan rumus:

$$fX = 3270$$

$$M = \frac{\text{---}}{N} = \frac{\text{---}}{60} = 54,5$$

(dibulatkan)

Hasil perhitungan dengan statistik deskriptif tersebut diperoleh mean sebesar 54,5 yang ditetapkan dalam skala pengukuran tergolong kategori **sangat tinggi/Sangat Baik** sebagaimana penjelasan dalam tabel penolong di atas bahwa nilai mean 54,5 berada pada garis interval nilai antara 51 – 60. Dengan demikian, gambaran etika sosial politik masyarakat Kota Parepare dalam kategori sangat tinggi atau sangat baik.

Hasil perhitungan *SPSS for windows versi 20,00* diperoleh angka pembulatan sebanyak 54,5 sehingga hasil analisis manual dan analisis *SPSS* hasilnya sama. Dengan demikian, analisis data hasil penelitian adalah valid dan reliable.

f. Pengaruh Teologi Islam terhadap Etika Sosial Politik Masyarakat Kota Parepare

Variable independent dalam penelitian ini adalah variable pengaruh teologi Islam masyarakat sebagai variable X atau variable berpengaruh. Sedangkan etika sosial politik masyarakat sebagai variable dependent atau variable terpengaruh yang ditandai dengan simbol Y. Kedua variable ini akan dihubungkan dengan menggunakan uji korelasional bivariate, baik yang dilakukan dengan menghitung secara manual maupun yang dilakukan dengan menggunakan analisis computer dengan *system SPSS for windows*.

1) Perhitungan *SPSS for Windows*

Perhitungan dengan menggunakan analisis computer sistem *SPSS for windows* diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

Correlations Teologi Islam terhadap Etika Sosial Politik Masyarakat

	Teologi Islam	Etika Sosial Politik
Teol Pearson Correlation	1	0.794**
Islam Sig. (2-tailed)		.000
N	60	60
Etik Pearson Correlation	0.794**	1
Sosi Sig. (2-tailed)	.000	

al N	60	60
Poli		
tik		

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil perhitungan analisis *corelation bivariate product moment* yang dikenal dengan *Correlation Pearsons* diperoleh hubungan atau pengaruh teologi Islam terhadap etika sosial politik masyarakat Kota Parepare sebesar **0,794**. Apabila nilai ini dimasukkan ke dalam skala pengukuran interpretasi data indeks korelasi "*r_{xy}*" *product moment*, maka tergolong kategori tinggi. Skala pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Interpretasi *Data Product Moment*

Besarnya " <i>r_{xy}</i> " <i>Product Moment</i>	Interpretasi antara Variabel X dan Variabel Y
0,000 – 0,199	Korelasi antara variabel X dan Y tergolong sangat lemah
0,200 – 0,399	Korelasi antara variabel X dan Y tergolong lemah/kurang
0,400 – 0,599	Korelasi antara variabel X dan Y tergolong cukup
0,600 – 0,799	Korelasi antara variabel X dan Y tergolong Kuat/baik/tinggi (0,794)*
0,800 – 1,000	Korelasi antara variabel X dan Y tergolong sangat kuat

*Nilai 0,794 adalah hasil perhitungan manual, *SPSS for windows* dan kalkulator casio fx 3600

Penafsiran data hasil perhitungan dengan sistem *SPSS for windows* dengan nilai 0,794 apabila diperhadapkan pada tabel interpretasi data, maka tergolong kategori tinggi/kuat/baik. Artinya hubungan atau pengaruh teologi Islam terhadap etika sosial politik masyarakat Kota Parepare adalah tinggi/kuat/baik.

2) Perhitungan dengan Sistem Manual dan Calculator casio fx 3600

Perhitungan analisis statistik dengan menggunakan cara manual dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat H_a dan H_0 dalam bentuk kalimat

H_a : Terdapat hubungan atau pengaruh teologi Islam terhadap etika sosial politik masyarakat Kota Parepare

Ho : Tidak terdapat hubungan atau pengaruh teologi Islam terhadap etika sosial politik masyarakat Kota Parepare

2. Membuat H_a dan H_0 dalam bentuk statistik

$H_a : r \neq 0$ = Terdapat hubungan atau pengaruh yang signifikan antara teologi Islam terhadap etika sosial politik masyarakat Kota Parepare

$H_0 : r = 0$ = Tidak terdapat hubungan atau pengaruh yang signifikan antara teologi Islam terhadap etika sosial politik masyarakat Kota Parepare

3. Membuat tabel penolong (lihat lampiran tabel penolong)
Telah diketahui berdasarkan tabel lampiran:

$$N = 60$$

$$\Sigma X = 3007$$

$$\Sigma Y = 3271$$

$$\Sigma X^2 = 151989$$

$$\Sigma Y^2 = 178787$$

$$\Sigma XY = 164545$$

Hasil perhitungan dengan kalkulator casio fx 3600, adalah:

$$K-out 3 (N) = 60$$

$$K-out 2 (\Sigma X) = 3007$$

$$K-out 1 (\Sigma X^2) = 151989$$

$$K-out 5 (\Sigma Y) = 3271$$

$$K-out 4 (\Sigma Y^2) = 178787$$

$$K-out 6 (\Sigma XY) = 164545$$

$$SHIF 9 (r_{xy}) = 0,794 \text{ (dibulatkan)}$$

3) Menghitung Koefisien Penentu/Koefisien Determinan (KP/KD)

$$\text{Rumus: } KP = r^2 \cdot 100\%$$

$$KP = 0,794^2 \times 100\% = 0,630 \times 100\% = 63,044\%$$

Jadi, kontribusi atau sumbangan teologi Islam terhadap etika sosial politik masyarakat Kota Parepare hanya 63,064% dan selebihnya sebanyak 36,936% dipengaruhi oleh faktor variabel lain.

4) Menguji Signifikansi; dengan rumus:

$$r\sqrt{n-2}$$

$$t_{hitung} = \frac{\quad}{\quad}$$

$$t_{hitung} = \frac{\sqrt{1-r^2}}{0,794\sqrt{58}}$$

$$t_{hitung} = \frac{\sqrt{1-0,794^2}}{0,794 \times 7,616}$$

$$t_{hitung} = \frac{6,047}{1-0,630} = \frac{6,047}{0,370}$$

$$t_{hitung} = 16,343$$

Kaidah pengujian signifikansi:

Jika $t_{hitung} \geq$ dari t_{tabel} , maka signifikan
Jika $t_{hitung} \leq$ dari t_{tabel} , maka tidak signifikan

Berdasarkan perhitungan di atas dengan ketentuan tingkat kesalahan 0,05 pada derajat bebas atau db = 60 - 2 = 58 sehingga di dapat $t_{tabel} = 2,390$ pada taraf signifikansi 0,01% dan 2,000 pada taraf signifikansi 0,025%, ternyata $t_{hitung} 16,343 \geq$ dari $t_{tabel} = 2,390/2,00$.

Kesimpulan: Peranan teologi Islam terhadap etika sosial politik masyarakat Kota Parepare adalah sangat signifikan.

PENUTUP

Peranan teologi Islam masyarakat Kota Parepare yang diuji dan dianalisis secara statistik deskriptif didapatkan nilai rata-rata 50 yang berada pada garis interval nilai antara 41 - 50 yang tergolong kategori tinggi/baik. Secara kualitatif dapat ditafsirkan dalam kategori tinggi.

Etika sosial politik masyarakat Kota Parepare yang diuji dan dianalisis secara statistik deskriptif diperoleh nilai rata-rata sebesar 54,5 yang berada pada garis interval nilai antara 51 - 60 pada distribusi frekuensi bergolong. Nilai tersebut tergolong kategori sangat tinggi atau sangat baik. Dengan demikian, gambaran etika sosial politik masyarakat Kota Parepare tergolong kategori sangat tinggi atau sangat baik.

Terdapat hubungan atau pengaruh positif antara teologi Islam terhadap etika sosial politik masyarakat Kota Parepare dengan perolehan nilai korelasi *product moment* sebesar $r_{xy} = 0,794$. Angka indeks korelasi ini tergolong kategori tinggi. Sumbangan atau kontribusi kedua variabel ini sebanyak 63,064% dan sisanya 36,936%. Artinya, pengaruh teologi Islam diikuti oleh etika sosial politik masyarakat di Kota Parepare. Semakin tinggi teologi Islam

masyarakat, diikuti oleh semakin tingginya etika sosial politik masyarakat di Kota Parepare. Perhitungan pengujian signifikansi dengan ketentuan tingkat kesalahan 0,05 dan 0,01 pada derajat bebas atau $db = 60 - 2 = 58$, sehingga di dapat $t_{tabel} = 2,390$ pada taraf signifikansi 0,01% dan 2,000 pada taraf signifikansi 0,025%, ternyata $t_{hitung} 16,343 \leq$ dari $t_{tabel} = 2,390/2,000$. Kesimpulan: korelasi antara peranan teologi Islam terhadap etika sosial politik masyarakat Kota Parepare adalah sangat signifikan atau sangat berarti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam Al-Ghazali*, Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam*, Cet. Ke 28; Beirut: Dar al-Masyriq, 1989.
- Anwar, *Transformasi Pendidikan (Upaya Memperkokoh Humanisme Teosentris Pendidikan Islam)*, Jurnal Studi Pendidikan, STAIN Parepare, Volume VII No. 13, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Cet. VII; Edisi IV: Jakarta PT. Gramedia, 2013.
- Fadjar, A. Malik, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, Cet. I; Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2005.
- Ghofir, Zuhairini dan Abdul, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang dengan UM Press, 2004.
- Ilyas, Suhairini, *Etika Remaja Islam*, (Bukittinggi: Yayasan al-Anshar, 1990.
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlaq*, Cet. V; Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2002.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama Edisi Revisi*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muliati, *Pengaruh Paham Keagamaan terhadap Etos Kerja Masyarakat Muslim Kota Parepare*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Nasir, Sahilun A., *Pemikiran Kalam (Teologi Islam) Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya*, Ed. I, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Riduwan, *Pengantar Statistika Sosial*, Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2012.
- Srijanti, Purwanto, Wahyu Pramono. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern* Edisi 2, Cet. II; Jakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Cet. V; Bandung: CV. Alfabeta, 1998.
- Susetyo, Budi, *Statistik Untuk Analisis Data Penilitis*, PT. Rafika Aditama, 2010.
- Tim Penelitian dan Pengembangan: Wahana Komputer, *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS*, Cet. I; Jakarta: Salemba Infotek, 2003.
- Toha, Miftah, *Perilaku Organisasi*. Cet. I; Jakarta: RinekaCipta, 1998.